

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN ANALISIS KELEMBAGAAN LMDH DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI RPH WANARAJA BKPH CIBATU KPH GARUT

Diaz Aprilian Kosasih¹, Ilham Adhya², Nina Herlina²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Kuningan, Indonesia

²Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20170710052@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the level of participation of the Forest Village Community, LMDH Institutional Effectiveness and economic impact analysis in the PHBM system at RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut the sample in this study is the cultivator at LMDH RPH Wanaraja. Data collection in this study used the interview method regarding CBFM program activities at RPH Wanaraja and literature study on CBFM management as well as organizational structure and allocation of profit sharing. The data obtained were analyzed by tabulation to determine the level of participation, as well as the effectiveness of LMDH institutions based on the principles of Good Forest Governance and the economic impact seen from the contribution of CBFM income. at the planning stage some of the cultivators were involved in the planning stage. In the implementation stage, the cultivators are involved in planting, maintaining and protecting the forest. the profit sharing allocation stage is involved in implementing the profit sharing allocation. LMDH institutions are not in accordance with the 4 principles of Good Forest Governance, there is no compatibility between accountability, transparency, democracy and participation. the economic impact of the PHBM program has not yet had an impact on the economy of the cultivators with a percentage of around 6.06% - 25.44% in Wanaraja RPH need further research on the implementation of policies in the PHBM program KPH Garut.

Keywords: Participation, institutional effectiveness, economic impact

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi Masyarakat Desa Hutan, Efektifitas Kelembagaan LMDH dan analisis dampak ekonomi dalam sistem PHBM di RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut sampel dalam penelitian ini adalah pembudidaya di LMDH RPH Wanaraja. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mengenai kegiatan program PHBM di RPH Wanaraja dan studi literatur tentang pengelolaan PHBM serta struktur organisasi dan alokasi bagi hasil. Data yang diperoleh dianalisis dengan tabulasi untuk mengetahui tingkat partisipasi, serta efektivitas kelembagaan LMDH berdasarkan prinsip Good Forest Governance dan dampak ekonomi dilihat dari kontribusi pendapatan PHBM. pada tahap perencanaan beberapa pembudidaya terlibat dalam tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, penggarap dilibatkan dalam penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. tahap alokasi bagi hasil terlibat dalam pelaksanaan alokasi bagi hasil. Lembaga LMDH tidak sesuai dengan 4 prinsip Good Forest Governance, tidak ada kesesuaian antara akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi. dampak ekonomi program PHBM belum berdampak pada perekonomian para pembudidaya dengan persentase sekitar 6,06% - 25,44% di RPH Wanaraja perlu penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dalam program PHBM KPH Garut..

Kata kunci: Partisipasi, efektivitas kelembagaan, dampak ekonomi

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, papan dan perumahan tidak terlepas dari jasa lingkungan, serta sangat bergantung pada hutan. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu alternatif Negara dalam mengelola hutan terfasilitasi oleh program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

(PHBM) yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan untuk mencapai kepentingan bersama, guna tercapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memperoleh manfaat yang optimal dan proporsional (Kurniawan, 2016).

Pengaruh Masyarakat Desa Hutan (MDH) terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat cukup signifikan, Hal itu disebabkan oleh jumlah desa hutan di Jawa Barat meliputi seperempat dari jumlah desa (1.370 desa) dengan jumlah penduduk mencapai 7.826.914 jiwa . Menanggapi keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap hambatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi hutan melalui lembaga pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara berkeadilan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Heryawan, 2011).

Hutan telah membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatannya, membantu masyarakat sekitar hutan untuk membuka lapangan kerja dan hutan berpengaruh terhadap ekonomi LMDH dilokasi produksi KPH Randublatung (Meilya, 2005). Sertifikasi PHBML memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,94%, peningkatan kapasitas masyarakat sebesar 52,76% dan peningkatan tutupan hutan sebesar 3,38%. Faktor faktor yang berpengaruh adalah partisipasi aktif anggota UMHR, keaktifan lembaga pengelola hutan, tingkat pemasaran produk sertifikasi dan dukungan stakeholder (Rohman, 2010).

Kondisi PHBM di BKPH Cibatu khususnya RPH Wanaraja mengalami naik turun dalam pengelolaan hutan dari periode tahun 2003 dengan isu kerusakan hutan yang terjadi dengan adanya operasi wanalaga lodaya dalam memberantas para petani yang menggarap ditanah yang disengketakan di lahan perhutani (Asmarani, 2003). Pada periode tahun 2012 ditanami dengan jenis tanaman kopi dengan luas 142,16 Ha yang terbagi oleh 5 LMDH dengan target pendapatan Rp 26.523.923.

Program PHBM di RPH Wanaraja mengalami naik turun dalam pengelolaannya Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dalam peningkatan partisipasi dan Efektivitas kelembagaan LMDH dalam rangka peningkatan peran kelembagaan PHBM bagi masyarakat desa hutan di BKPH Cibatu RPH Wanaraja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2021 di KPH Garut BKPH Cibatu RPH Wanaraja LMDH Cinta Wana Sugih Tani, LMDH Cinta Hutan, LMDH Talaga Hurip, LMDH Sukamenak dan LMDH Wana Lestari.

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, Kamera dan Panduan Wawancara. Dan objek penelitian ini yaitu Masyarakat penggarap anggota LMDH di RPH Wanaraja.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari ketua LMDH, pengurus LMDH, dan KSS PHBM KPH Garut mengenai kegiatan dalam PHBM di BKPH Cibatu. Penentuan LMDH berdasarkan LMDH yang aktif dalam program pengelolaan PHBM di RPH Wanaraja. .

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Shidiq & Choiri, 2019). Pengolahan data kualitatif diolah melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Tahapan kedua adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk persentase, grafik, dan bagan Huberman (1992) dalam (Nuraeni et al., 2020) . Seluruh informasi yang diperoleh dalam tahap penyajian data digabungkan dalam suatu bentuk padu dan mudah dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.:

Partisipasi Masyarakat

Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Partisipasi Tahap Perencanaan
2. Partisipasi Tahap Pelaksanaan
3. Partisipasi Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil

Efektivitas Kelembagaan LMDH

Good Forest Governance adalah suatu tindakan atau cara melakukan kebijakan kehutanan dengan kualitas hasil yang tepat atau memadai. Menurut (Solihin, 2005), prinsip Good Forest Governance terdiri atas prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan partisipasi. (Ekawati et al., 2014).

Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pendapatan PHBM berdasarkan jenis komoditi MPTS sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat desa hutan. Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga masyarakat desa hutan dilakukan pencarian data melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan informan dan responden. Setelah itu data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Bahruzin et al., 2014):

$$\text{kontribusi PHBM} = \frac{\text{penerimaan}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Program PHBM

1. LMDH Cinta Wana Sugih Tani

Realisasi program PHBM di LMDH Cinta Wana Sugih Tani pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tahap perencanaan LMDH Cinta Wana Sugih Tani

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembuatan Rencana Operasional	Terlibat	1	2,5
		tidak terlibat	39	97,5

Penggarap di LMDH Cinta Wana Sugih Tani terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan dengan fungsi lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tahap pelaksanaan LMDH Cinta Wana Sugih Tani

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Persemaian	Terlibat	40	100
		tidak terlibat	0	0
2	Pemeliharaan	Terlibat	40	100
		tidak terlibat	0	0
3	Tebangan	Terlibat	0	0
		tidak terlibat	40	100
4	Keamanan hutan	Terlibat	40	100
		tidak terlibat	0	0

Penggarap di LMDH Cinta Wana Sugih Tani terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Cinta Wana Sugih Tani

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembagian dan pengalokasian bagi hasil	Terlibat	40	100
		tidak terlibat	0	0

2. LMDH Cinta Hutan

Realisasi program PHBM di LMDH Cinta Hutan pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. Dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Tahap perencanaan LMDH Cinta Hutan

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembuatan Rencana	terlibat	1	2
	Operasional	tidak terlibat	49	98

Penggarap di LMDH Cinta Hutan terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangkan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Tahap pelaksanaan LMDH Cinta Hutan

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Persemaian	Terlibat	50	100
		tidak terlibat	0	0
2	Pemeliharaan	Terlibat	50	100
		tidak terlibat	0	0
3	Tebangan	Terlibat	0	0
		tidak terlibat	50	100
4	Keamanan hutan	Terlibat	50	100
		tidak terlibat	0	0

Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Cinta Hutan

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	pembagian dan pengalokasian bagi hasil	Terlibat	50	100
		tidak terlibat	0	0

3. LMDH Talaga Hurip

Realisasi program PHBM pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Tahap perencanaan LMDH Talaga Hurip

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembuatan Rencana Operasional	terlibat	1	1,9
		tidak terlibat	53	98,1

Penggarap di LMDH Talaga Hurip terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Tahap pelaksanaan LMDH Talaga Hurip

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Persemaian	terlibat	54	100
		tidak terlibat	0	0
2	Pemeliharaan	terlibat	54	100
		tidak terlibat	0	0
3	Tebangan	terlibat	0	0
		tidak terlibat	54	100
4	Keamanan hutan	terlibat	54	100
		tidak terlibat	0	0

Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Talaga Hurip

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	pembagian dan pengalokasian bagi hasil	Terlibat	54	100
		tidak terlibat	0	0

4. LMDH Sukamenak

Realisasi program PHBM di LMDH Talaga Hurip pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat . hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Tahap perencanaan LMDH Sukamenak

Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pembuatan Rencana Operasional	terlibat	1	3,6
	tidak terlibat	27	96,4

Penggarap di LMDH Talaga Hurip terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Tahap pelaksanaan LMDH Sukamenak

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Persemaian	terlibat	28	100
		tidak terlibat	0	0
2	Pemeliharaan	terlibat	28	100
		tidak terlibat	0	0
3	Tebangan	terlibat	0	0
		tidak terlibat	28	100
4	Keamanan hutan	terlibat	28	100
		tidak terlibat	0	0

Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Sukamenak

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pembagian Dan Pengalokasian Bagi Hasil	Terlibat	28	100
		Tidak Terlibat	0	0

5. LMDH Wana Lestari

Realisasi program PHBM di LMDH Wana Lestari pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Tahap perencanaan LMDH Wana Lestari

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembuatan Rencana Operasional	terlibat	1	2,9
		tidak terlibat	34	97,1

Penggarap di LMDH Wana Lestari terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 14 Tahap pelaksanaan LMDH Wana Lestari

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Persemaian	terlibat	35	100
		tidak terlibat	0	0
2	Pemeliharaan	terlibat	35	100
		tidak terlibat	0	0
3	Tebangan	terlibat	0	0
		tidak terlibat	35	100
4	Keamanan hutan	terlibat	35	100
		tidak terlibat	0	0

Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa

Tabel 12 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Wana Lestari

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	pembagian dan pengalokasian bagi hasil	Terlibat	35	100
		tidak terlibat	0	0

B. Efektivitas Kelembagaan LMDH

Efektivitas kelembagaan merupakan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya dengan Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kelembagaan adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan, partisipasi dan sistem yang dianut (Anantanyu et al., 2015).

Program PHBM merupakan kemitraan antara Perhutani dan LMDH yang mempunyai beberapa tahapan. Yaitu tahap perencanaan berupa penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama), tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan persemaian, pemeliharaan, keamanan hutan dan alokasi bagi hasil. Namun pada kenyataannya penggarap tidak mengikuti perjanjian dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) tidak adanya kesesuaian jarak tanam dan hanya membayar sharing tanpa mengetahui bagaimana pengalokasiannya. Efektivitas dapat dievaluasi dari dua aspek, yaitu proses realisasi dan implementasi tujuan organisasi yang tercermin dalam perilaku organisasi dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Perilaku yang baik mengarah pada upaya pencapaian tujuan yang tidak akan bertahan lama (Hutapea, 2008). Berdasarkan hasil penelitian partisipasi sebagai anggota LMDH baru bersifat pelaksana. dari keseluruhan tahap PHBM, penggarap tidak terlibat langsung dalam perencanaan namun dalam pelaksanaan pemeliharaan, keamanan dan pemanfaatan bagi hasil penggarap ikut terlibat. Hal tersebut dikarenakan adanya tanggung jawab penggarap atas lahan andil yang perhutani berikan. Namun sebagian penggarap memanfaatkan lahan andil dengan menanam komoditi Pertanian dengan dalih sebari menunggu komoditi kopi panen. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan pihak Perhutani terhadap penggarap dalam penerapan program PHBM. Menurut (Subarudi, 2008) Good Forest Governance adalah suatu tata cara menentukan kebijakan kehutanan dengan kualitas hasil yang tepat. Prinsip Good Forest Governance terdiri dari prinsip akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi.

Kelembagaan LMDH di RPH Wanaraja dapat dikatakan belum berjalan efektif dikarenakan 4 aspek Good Forest Governance belum terpenuhi yaitu:

1. Prinsip akuntabilitas

LMDH di RPH Wanaraja tidak memiliki lembar pertanggungjawaban sehingga tidak ada rencana kegiatan yang jelas.

2. Prinsip Transparansi

LMDH di RPH Wanaraja terdapat beberapa hal yang tidak transparan dalam melaksanakan Program PHBM. sebagian besar pengurus LMDH belum mengetahui tugas dan kewajiban masing masing. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap

pengurus LMDH. Dalam pengelolaan bagi hasil pun hanya ketua LMDH dan pihak Perhutani. Hasil tersebut tidak disosialisasikan kepada anggota yang lain sehingga para anggota hanya mengetahui tentang kewajiban membayar lahan andil tersebut.

3. Prinsip Demokrasi

Suatu lembaga akan berjalan jika dalam pengambilan keputusan menggunakan asas demokrasi. Namun dalam pembuatan rencana operasional hanya ketua yang ikut dalam melaksanakan musyawarah dan sebagian lagi bertindak secara pasif dan hanya menerima keputusan yang telah terjadi sehingga peran penggarap dianggap netral menunggu hasil musyawarah dari pengurus inti LMDH saja.

4. Prinsip Partisipasi

Partisipasi penggarap dalam LMDH hanya terbatas sebagai pelaksana kegiatan. Penggarap belum diikut sertakan dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan kelembagaan LMDH di RPH Wanaraja belum berjalan efektif dikarenakan belum memenuhi keempat prinsip Good Forest Governance. Sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 13 Efektivitas kelembagaan berdasarkan 4 prinsip Good Forest Governance

No	Prinsip <i>Good Forest Governance</i>	Kriteria	Implementasi di LMDH RPH Wanaraja
1	Akuntabilitas	Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	Belum ada Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan perjanjian kerja sama
2	Transparansi	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	Belum ada ketersediaan informasi yang merata dan hanya sebatas ketua LMDH dalam penyusunan dan implementasi kebijakan
3	Demokrasi	Kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi	Belum ada kebebasan dalam aspirasi karena setiap kebijakan hanya disusun oleh pengurus inti LMDH
		Kesempatan yang sama bagi anggota penggarap untuk memilih dan membangun keputusan bersama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik	Belum ada kesempatan yang sama dalam membangun keputusan bersama dalam pengambilan kebijakan karena kebijakan ditentukan oleh ketua LMDH
4	Partisipasi	Pengambilan keputusan yang didasarkan atas Keputusan bersama	Belum adanya pengambilan keputusan yang didasari atas demokrasi dikarenakan para pengarah tidak terlibat dalam perencanaan dan hanya sebatas pelaksana

C. Dampak Ekonomi

Dalam program PHBM di LMDH yang berada di RPH Wanaraja pendapatan para penggarap dilihat dari hasil yang didapatkan dengan komoditi kopi sebagai MPTS yang secara resmi ditanam oleh penggarap sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mana sesuai dengan hitungan Perhutani 1 pohon kopi dalam setahun menghasilkan beberapa kilogram disesuaikan dengan usia kopi tersebut:

1. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 0 - 1 tahun menghasilkan buah kopi seberat 0,5 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg

2. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 1 - 2 tahun menghasilkan buah kopi seberat 1 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg
3. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 2 – 3 tahun menghasilkan buah kopi seberat 2 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg
4. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 3 tahun ke atas menghasilkan buah kopi seberat 3 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 Rp/Kg

Dari keterangan diatas merupakan standar dalam penentuan harga komoditi kopi berdasarkan jumlah pohonnya yang menjadi dasar dalam penentuan total keuntungan PHBM yang akan dibagi hasilkan sesuai persentase yang ada dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama).

Tabel 13 Dampak Ekonomi LMDH RPH Wanaraja

No	Lokasi LMDH	Sumber Penerimaan	Nilai Penerimaan	Persentase (%)
1	LMDH Cinta Wana Sugih Tani	Penerimaan PHBM komoditi kopi	14.887.500	21,21
		Penerimaan non PHBM komoditi kopi	55.300.000	78,79
		Total	70.187.500	100
2	LMDH Cinta Hutan	Penerimaan PHBM komoditi kopi	8.426.953	10,83
		Penerimaan non PHBM komoditi kopi	69.350.000	89,17
		Total	77.776.953	100
3	LMDH Talaga Hurip	Penerimaan PHBM komoditi kopi	29.885.938	25,44
		Penerimaan non PHBM komoditi kopi	87.600.000	74,56
		Total	1.174.855.938	100
4	LMDH Sukamenak	Penerimaan PHBM Komoditi Kopi	9.768.750	21,2
		Penerimaan Non PHBM Komoditi Kopi	36.300.000	79,8
		Total	46.068.870	100
5	LMDH Wana Lestari	Penerimaan PHBM komoditi kopi	1.606.914	6,06
		Penerimaan non PHBM komoditi kopi	14.900.000	93,94
		Total	16.506.914	100

Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa PHBM dengan Komoditi Kopi belum mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan penggarap di RPH Wanaraja hal itu berbanding terbalik dengan penelitian Bahruzin et al (2014) di KPH Bandung Utara. LMDH Cinta Wana Sugih Tani PHBM komoditi kopi berkontribusi sebesar 21,21% terhadap total pendapatan penggarap, LMDH Cinta Hutan PHBM 10,83%, . LMDH Talaga Hurip 25,44%, LMDH Sukamenak 21,2% dan LMDH Wana Lestari 6,06%, Sehingga pendapatan penggarap dari program PHBM belum berkontribusi dikarenakan usia tanam kopi penggarap yang belum optimal berbuah dan juga PHBM di RPH Wanaraja hanya melegalkan kegiatan tumpangsari dengan komoditi kopi.

SIMPULAN

Partisipasi penggarap dalam melaksanakan Program PHBM hanya bersifat parsial dikarenakan partisipasi penggarap sebatas pelaksana yang aktif namun untuk kegiatan perencanaan hanya sebagian anggota LMDH yang ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan operasional.

Efektivitas Kelembagaan LMDH masih belum sesuai dengan 4 prinsip Good Forest Governance dikarenakan belum ada kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan standar operasional yang berlaku, dalam pembuatan rencana operasional tidak semua penggarap namun hanya sebatas ketua saja yang terlibat, akses informasi sulit dijangkau dikarenakan penggarap hanya mendapatkan perintahnya saja dan terbatas

hanya sebagian pengurus LMDH, belum adanya keputusan bersama dikarenakan penggarap hanya mewakilkan terhadap ketua LMDH

Nilai dampak ekonomi dari adanya program PHBM belum memberikan dampak signifikan dikarenakan PHBM di RPH Wanaraja hanya terbatas pada komoditi kopi yang sangat bergantung kepada usia tanam dalam mendapatkan panen yang optimal

SARAN

Perlu adanya penelitian lanjutan terhadap implementasi kebijakan didalam pelaksanaan program PHBM di KPH Garut, serta perlu adanya penelitian lanjutan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada KPH Garut Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat Banten yang telah memberikan ijin lokasi penelitian. Selanjutnya kepada Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan yang telah memberikan bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S., Sumardjo, S., Slamet, M., & Tjitropranoto, P. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kelembagaan Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 5(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v5i1.9803>
- Asmarani, A. 2003. Komunikasi Politik Dalam Konflik Pertanahan (Isu Kerusakan Hutan dan Penjulukan (name calling) “ penjarah hutan ” terhadap petani penggarap wilayah kehutanan di kabupaten Garut). *Manajerial*, 10, 81–91
- Bahruzin, Hidayat, A., & Putri, E. I. K. 2014. Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya Dan Lingkungan*, 1(1).
- Dwi, S. 2012. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ekawati, S., Dwiprabowo, H., Harun, M. K., Handoyo, Salaka, F. J., Subekti, B., & Raharjo, K. D. 2014. Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Heryawan, A. 2011. Pengelolaan Hutan di Jawa Barat. *Neraca Harian*. Retrieved from <http://www.neraca.co.id/harian/article/3037>
- Hutapea, P. 2008. *Kompetensi plus : teori, desain, kasus, dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, A. 2016. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki,

- Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yosowono). Universitas Negri Semarang. [skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Meilya, A. 2005. Peluang Peningkatan Peranan Hutan Produksi KPH Randublatung Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nuraeni, R., Ardiansyah, S. G., & Zanthi, L. S. 2020. Permasalahan Matematika Aritmatika Sosial Dalam Bentuk Cerita: Bagaimana Deskripsi KesalahanKesalahan Jawaban Siswa. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 5(1). <https://doi.org/10.25157/teorema.v5i1.3345>.
- Rohman, N. 2010. Kajian Dampak Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) terhadap Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). [skripsi], Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Shidiq, U., & Choiri, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9) [.http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1)
- Solihin, D. 2005 Juli 19. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah. Retrieved from <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-pembangunandaerahkonsepstrategi-tahapan-dan-proses/tangga>